

**DAFTAR RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN KEDUA
PADA PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
PRIORITAS TAHUN 2025**

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR (KOMISI I)	Proses Penyusunan
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR (KOMISI II)	Proses Penyusunan
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR (KOMISI III)	Tahap Pembicaraan Tk. I bersama Pemerintah
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR (KOMISI III)	Usulan baru (Long list Perubahan No. 68)
5.	RUU tentang Perampasan Aset (RUU tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana)	DPR (KOMISI III)	Usulan baru (Long list No. 96)
6.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR (KOMISI IV)	Proses Penyusunan
7.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR (KOMISI IV)	Proses Penyusunan
8.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang	DPR (KOMISI V)	Proses Penyusunan

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		
9.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR (KOMISI VI)	Proses Penyusunan
10.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR (KOMISI VI)	Proses Penyusunan
11.	RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	DPR (KOMISI VII)	Operan (Carry Over) Selesai Tahap Pembicaraan Tk. I pada tanggal 11 Sept 2025, menunggu jadwal Paripurna untuk disahkan sebagai Undang-Undang
12.	RUU tentang Kawasan Industri	DPR (KOMISI VII)	Usul baru (Long list Perubahan No. 67)
13.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR (KOMISI VIII)	Proses Penyusunan
14.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR (KOMISI IX)	Proses Penyusunan
15.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR (KOMISI X)	Proses Penyusunan
16.	RUU tentang Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	DPR (KOMISI XI)	Proses Penyusunan

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
17.	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	DPR (KOMISI XII)	Operan (<i>Carry Over</i>) Tahap Pembicaraan Tk. I bersama Pemerintah
18.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR (KOMISI XIII)	Proses Penyusunan
19.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
20.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
21.	RUU tentang Komoditas Strategis	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
22.	RUU tentang Pertekstilan	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
23.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	Sudah ada SurPres, menunggu penugasan pembahasan dari Bamus
24.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
25.	RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	(dalam Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 berjudul “RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern”)		
26.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
27.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
28.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
29.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
30.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR (BADAN LEGISLASI)	Proses Penyusunan
31.	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim	DPR (ANGGOTA)/ DPD	Tahap Harmonisasi di Badan Legislasi sesuai surat Anggota dari Fraksi PAN tertanggal 16 September 2025)
32.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	DPR (ANGGOTA)	Tahap Harmonisasi di Badan Legislasi sesuai surat Anggota (Melly

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
			Goeslaw tertanggal 17 September 2025)
33.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR (ANGGOTA)/ DPD	Proses Penyusunan
34.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR (ANGGOTA)/ DPD	Proses Penyusunan
35.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru (Long list Perubahan No. 73)
36.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR (BADAN LEGISLASI)/ DPD	Usulan Baru (Long list No. 149)
37.	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan Baru (Long list No. 188) Saat ini Kemendagri sudah selesai menyiapkan NA dan draft RUU nya. (keterangan dari Wamenkum RI)
38.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	DPR (ANGGOTA)	Usulan baru (Long list No. 40)
39.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	Operan (<i>Carry Over</i>)
40.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH	Operan (<i>Carry Over</i>)
41.	RUU tentang Desain Industri	PEMERINTAH	Surpres sudah disampaikan ke DPR 26 Agustus 2025

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
42.	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH	Surpres sudah disampaikan ke DPR 26 Agustus 2025
43.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara	PEMERINTAH	Operan (Carry Over) Selesai Tahap Pembicaraan Tk. I pada tgl 17 Sept 2025, menunggu jadwal Paripurna untuk disahkan sebagai Undang-Undang
44.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	Proses permohonan SurPres baru oleh Pemerintah
45.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	PEMERINTAH	Penyusunan di internal Pemerintah
46.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	PEMERINTAH	Penyusunan di internal Pemerintah
47.	RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati)	PEMERINTAH	Usulan baru (Long list No. 91)
48.	RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah	PEMERINTAH	Usulan baru (Long list No. 100)
49.	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara	PEMERINTAH	Usulan baru (Long list No. 164)
50.	RUU tentang Jaminan Benda Bergerak	PEMERINTAH	Usulan baru (Long list No. 177)
51.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	PEMERINTAH	Usulan baru (Long list Perubahan No. 79)
52.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPD	Sudah dikirim ke Pimpinan DPR

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain: - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; - RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (<i>Carry over</i>); dan - RUU lainnya.
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Jakarta, 18 September 2025
Badan Legislasi DPR RI
Ketua,

DR. BOB HASAN, SH., MH.

Wakil Menteri Hukum RI
Menteri,

PROF. DR. EDDY OMAR SHARIF
HIARIEJ, S.H., M.Hum.

Panitia Perancang Undang-Undang DPD
RI
Wakil Ketua,

DR. RIEDNO GRAAL TALIAWO, S.SOS.,
M.SI.

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PRIORITAS TAHUN 2026

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
1.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	DPR (KOMISI I)	Luncuran Prioritas 2025
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR (KOMISI II)	Luncuran Prioritas 2025
3.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	DPR (KOMISI II)	Usulan baru (Long list No. 5)
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR (KOMISI III)	Luncuran Prioritas 2025 Tahap Pembicaraan Tk. I bersama Pemerintah
5.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR (KOMISI III)	Luncuran Prioritas 2025
6.	RUU tentang Perampasan Aset (RUU tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana)	DPR (KOMISI III)	Luncuran Prioritas 2025
7.	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR (KOMISI III)	Usulan baru (Long list perubahan No. 69)

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
8.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR (KOMISI IV)	Luncuran Prioritas 2025
9.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR (KOMISI IV)	Luncuran Prioritas 2025
10.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR (KOMISI V)	Luncuran Prioritas 2025
11.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR (KOMISI VI)	Luncuran Prioritas 2025
12.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR (KOMISI VI)	Luncuran Prioritas 2025
13.	RUU tentang Kawasan Industri	DPR (KOMISI VII)	Luncuran Prioritas 2025
14.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR (KOMISI VIII)	Luncuran Prioritas 2025
15.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	DPR (KOMISI VIII)	Usulan baru (Long list No. 18)
16.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	DPR (KOMISI IX)	Luncuran Prioritas 2025

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
17.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR (KOMISI X)	Luncuran Prioritas 2025
18.	RUU tentang Keuangan Negara	DPR (KOMISI XI)	(<i>Omnibus Law</i>) Usulan baru (Long list No. 138)
19.	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	DPR (KOMISI XII)	Luncuran Prioritas 2025
20.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR (KOMISI XIII)	Luncuran Prioritas 2025
21.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prioritas 2025
22.	RUU tentang Komoditas Strategis	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prioritas 2025
23.	RUU tentang Pertekstilan	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prioritas 2025
24.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prioritas 2025
25.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prioritas 2025

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
26.	RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (dalam Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 berjudul “RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern”)	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prioritas 2025
27.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prioritas 2025
28.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prioritas 2025
29.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prioritas 2025
30.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR (BADAN LEGISLASI)/ DPD	Luncuran Prioritas 2025
31.	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	DPR (BADAN LEGISLASI)	Luncuran Prioritas 2025
32.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru (Long list No. 50)
33.	RUU tentang Satu Data Indonesia	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru (Long list perubahan No. 74)
34.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru (Long list perubahan No. 72)

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi		
35.	RUU tentang Transportasi Online	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru (Long list perubahan No. 71)
36.	RUU tentang <i>Patriot Bond</i> / RUU tentang Surat Berharga	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru (Long list perubahan No. 70)
37.	RUU tentang Daya Anagata Nusantara	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru (Long list perubahan No. 78)
38.	RUU tentang Pekerja Lepas/RUU tentang Pekerja Platform Indonesia/RUU tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru (Long list perubahan No. 80)
39.	RUU tentang Pelelangan Aset	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru (Long list perubahan No. 76)
40.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru (Long list No. 28)
41.	RUU tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Hewan (dalam Prolegnas 2025-2029 berjudul RUU tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Hewan)	DPR (BADAN LEGISLASI)	Usulan baru (Long list No. 10)
42.	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim	DPR	Luncuran Prioritas 2025

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
		(ANGGOTA)/ DPD	
43.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prioritas 2025
44.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR (ANGGOTA)/ DPD	Luncuran Prioritas 2025
45.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR (ANGGOTA) / DPD	Luncuran Prioritas 2025
46.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	DPR (ANGGOTA)	Luncuran Prioritas 2025
47.	RUU tentang Komoditas Khas	DPR (ANGGOTA)	Usulan baru (Long list No. 55)
48.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	DPR (ANGGOTA)	Usulan baru (Long list perubahan No. 75)
49.	RUU tentang Bank Makanan	DPR (ANGGOTA)	Usulan baru (Long list No. 19)
50.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	PEMERINTAH	Luncuran Prioritas 2025
51.	RUU tentang Narkotika dan Psikotropika	PEMERINTAH	Luncuran Prioritas 2025
52.	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	PEMERINTAH	Luncuran Prioritas 2025
53.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri	PEMERINTAH	Luncuran Prioritas 2025
54.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	PEMERINTAH	Luncuran Prioritas 2025

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
55.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran	PEMERINTAH	Luncuran Prioritas 2025
56.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	PEMERINTAH	Luncuran Prioritas 2025
57.	RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati)	PEMERINTAH	Luncuran Prioritas 2025
58.	RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah	PEMERINTAH	Luncuran Prioritas 2025
59.	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarneegara	PEMERINTAH	Luncuran Prioritas 2025
60.	RUU tentang Jaminan Benda Bergerak	PEMERINTAH	Luncuran Prioritas 2025
61.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	PEMERINTAH	Luncuran Prioritas 2025
62.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH	Usulan baru (Long list No. 173)
63.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	PEMERINTAH	Usulan baru (Long list No. 86)
64.	RUU tentang Badan Usaha	PEMERINTAH	Usulan baru (Long list No. 165)
65.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	PEMERINTAH	Usulan baru (Long List No. 36)
66.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39	PEMERINTAH	Usulan baru (Long List No.94)

NO.	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN
	Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia		
67.	RUU tentang Bahasa Daerah	DPD	Usulan baru (Long list No. 154)

DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA	
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi, antara lain: a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian; b. RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (<i>Carry over</i>); dan c. RUU lainnya.
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

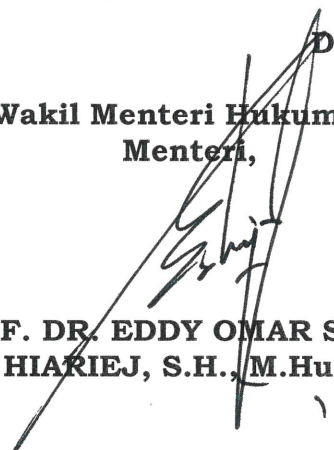
Jakarta, 18 September 2025
Badan Legislasi DPR RI
Ketua,



DR. BOB HASAN, SH., MH.

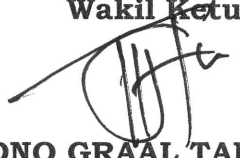
Wakil Menteri Hukum RI
Menteri,

PROF. DR. EDDY OMAR SHARIF
HIARIEJ, S.H., M.Hum.



Panitia Perancang Undang-Undang DPD
RI
Wakil Ketua,

DR. RIEDNO GRAAL TALIAWO, S.SOS.,
M.SI.



**DAFTAR PERUBAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
PADA PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
TAHUN 2025—2029**

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
1.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran	DPR	
2.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	DPR	
3.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	DPR	
4.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	DPR	
5.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	DPR	
6.	RUU tentang Perkumpulan	DPR	
7.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang	DPR	
8.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	DPR	
9.	RUU tentang Sistem Tata Produksi dan Niaga Pangan	DPR	
10.	RUU tentang Kesejahteraan dan Perlindungan Hewan	DPR	
11.	RUU tentang Pertanian	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
12.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan	DPR	
13.	RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	DPR	
14.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi	DPR	
15.	RUU tentang Pertekstilan	DPR	
16.	RUU tentang Sandang	DPR	
17.	RUU tentang Radio dan Televisi Republik Indonesia	DPR	
18.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat	DPR	
19.	RUU tentang Bank Makanan	DPR	
20.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf	DPR	
21.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja	DPR/ PEMERINTAH	
22.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	DPR	
23.	RUU tentang Kefarmasian	DPR	
24.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	Tahun 2009 tentang Kepemudaan		
25.	RUU tentang Pendidikan dan Layanan Kedokteran Hewan	DPR	
26.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya	DPR/ PEMERINTAH	
27.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman	DPR/ PEMERINTAH	
28.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	DPR	
29.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	DPR	
30.	RUU tentang Permuseuman	DPR/ PEMERINTAH	
31.	RUU tentang Penghapusan Piutang Negara	DPR	
32.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	DPR	
33.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	DPR	
34.	RUU tentang Investasi Negara	DPR	
35.	RUU tentang Profesi Kurator	DPR	
36.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	DPR/ PEMERINTAH	
37.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis		
38.	RUU tentang Pidana Tutupan	DPR	
39.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	DPR	
40.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan	DPR	
41.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten	DPR	
42.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Utara	DPR	
43.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang	DPR	
44.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	DPR	<i>Omnibus</i> (Klaster Pendidikan Kedokteran dan Klaster Pelayanan Kesehatan/Obat)
45.	RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan	DPR	
46.	RUU tentang Boikot, Divestasi, dan Sanksi	DPR	
47.	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol	DPR	
48.	RUU tentang Keamanan Nasional	DPR	
49.	RUU tentang Penyadapan	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
50.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia	DPR	
51.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	DPR	
52.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi	DPR	
53.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial	DPR	
54.	RUU tentang Komoditas Strategis	DPR	
55.	RUU tentang Komoditas Khas	DPR	
56.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak	DPR/DPD	
57.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	DPR	
58.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	DPR	
59.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan	DPR	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
60.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria	DPR	
61.	RUU tentang Pengelolaan Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Moda Transportasi	DPR	
62.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia	DPR	
63.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara	DPR	
64.	RUU tentang Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>)	DPR	
65.	RUU tentang Pelindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (dalam Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 berjudul “RUU tentang Pengaturan Pasar Ritel Modern”)	DPR	
66.	RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	DPR	
67.	RUU tentang Kawasan industri	DPR	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
68.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	DPR	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
69.	RUU tentang Jabatan Hakim	DPR	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
70.	RUU tentang <i>Patriot Bond</i> /RUU tentang Surat Berharga	DPR	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
71.	RUU tentang Transportasi Online	DPR	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
72.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi	DPR	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
73.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri	DPR	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
74.	RUU tentang Satu Data Indonesia	DPR	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
75.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	DPR	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
76.	RUU tentang Pelelangan Aset	DPR	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
77.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DPR	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
78.	RUU tentang Daya Anagata Nusantara	DPR	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
79.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR/ PEMERINTAH	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
80.	RUU tentang Pekerja Lepas/RUU tentang Pekerja Platform Indonesia/RUU	DPR/ PEMERINTAH	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	tentang Perlindungan Pekerja Ekonomi GIG		
81.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
82.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
83.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
84.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (RUU tentang Narkotika dan Psikotropika)	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	<i>Operan (Carry Over)</i>
85.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	
86.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	DPR/ PEMERINTAH	
87.	RUU tentang Hukum Acara Perdata	DPR/ PEMERINTAH	
88.	RUU tentang Hukum Perdata Internasional	DPR/ PEMERINTAH	
89.	RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik	DPR/ PEMERINTAH	
90.	RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang	DPR/ PEMERINTAH	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	Dipisahkan (RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara)		
91.	RUU tentang Pelaksanaan Pidana Mati (RUU tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati)	DPR/ PEMERINTAH	
92.	RUU tentang Grasi (RUU tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi)	DPR/ PEMERINTAH	
93.	RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	DPR/ PEMERINTAH	
94.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	DPR/ PEMERINTAH	
95.	RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber	DPR/ PEMERINTAH	
96.	RUU tentang Perampasan Aset (RUU tentang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana)	DPR/ PEMERINTAH	
97.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (RUU tentang Desain Industri)	DPR/ PEMERINTAH	
98.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta	DPR/ PEMERINTAH	
99.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik/RUU tentang Hukum Acara Sengketa Informasi	DPR/ PEMERINTAH	
100.	RUU tentang Penyesuaian Pidana/RUU tentang Penyesuaian Ketentuan Pidana	DPR/ PEMERINTAH	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah		
101.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	DPR/DPD	
102.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	DPR/DPD	<i>Operan (Carry Over)</i>
103.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	DPR/DPD	
104.	RUU tentang Pertanahan	DPR/DPD	
105.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah	DPR/DPD	
106.	RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	DPR/DPD	
107.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan	DPR/DPD	
108.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang	DPR/DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan		
109.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	DPR/DPD	
110.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman	DPR/DPD	
111.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	DPR/DPD	
112.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	DPR/DPD	
113.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan	DPR/DPD	
114.	RUU tentang Sumber Daya Genetik	DPR/DPD	
115.	RUU tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	DPR/DPD	
116.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam	DPR/DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
117.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan	DPR/DPD	
118.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	DPR/DPD	
119.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	DPR/DPD	
120.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	DPR/DPD	
121.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara	DPR/DPD	
122.	RUU tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan	DPR/DPD	<i>Operan (Carry Over)</i>
123.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh	DPR/DPD	
124.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji	DPR/DPD	
125.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	DPR/DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
126.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	DPR/DPD	
127.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan/RUU tentang Sistem Pengupahan	DPR/DPD	
128.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	DPR/DPD	
129.	RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga	DPR/DPD	
130.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	DPR/DPD	
131.	RUU tentang Kesehatan Masyarakat	DPR/DPD	
132.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	DPR/DPD	
133.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen	DPR/DPD	
134.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi	DPR/DPD	
135.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan	DPR/DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
136.	RUU tentang Ekonomi Syariah	DPR/DPD	
137.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	DPR/DPD	
138.	RUU tentang Keuangan Negara/RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	DPR/DPD	(<i>Omnibus Law</i>)
139.	RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan	DPR/DPD	<i>Operan (Carry Over)</i>
140.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	DPR/DPD	
141.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan	DPR/DPD	
142.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi	DPR/DPD	
143.	RUU tentang Geologi	DPR/DPD	
144.	RUU tentang Keanekaragaman Hayati	DPR/DPD	
145.	RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim/RUU tentang Perubahan Iklim/RUU tentang Keadilan Iklim	DPR/DPD	
146.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	DPR/DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
147.	RUU tentang Kewirausahaan/ RUU tentang Kewirausahaan Nasional	DPR/DPD	
148.	RUU tentang Masyarakat Hukum Adat	DPR/DPD	
149.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh	DPR/DPD	
150.	RUU tentang Daerah Kepulauan	DPR/DPD	
151.	RUU tentang Pembangunan Keluarga Berkualitas/RUU tentang Ketahanan Keluarga	DPR/DPD	
152.	RUU tentang Sistem Transportasi dan Logistik Nasional/RUU tentang Sistem Jaringan Transportasi Nasional/RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional	PEMERINTAH	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
153.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/ RUU tentang Jaminan Sosial Pekerja Rentan	DPR/DPD	
154.	RUU tentang Bahasa Daerah	DPR/DPD	
155.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	DPR/DPD	
156.	RUU tentang Kesetaraan Gender	DPR/DPD	
157.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	DPR/DPD	

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
158.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara	DPR/DPD	
159.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara	DPR/DPD	
160.	RUU tentang Sistem Penyuluhan Pertanian/RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan	PEMERINTAH/ DPD	
161.	RUU tentang Pengelolaan Ruang Udara	PEMERINTAH/ DPD	<i>Operan (Carry Over)</i>
162.	RUU tentang Pembatasan Transaksi Uang Kartal	PEMERINTAH	
163.	RUU tentang Pembinaan Hukum Nasional	PEMERINTAH	
164.	RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarneegara	PEMERINTAH	
165.	RUU tentang Badan Usaha	PEMERINTAH	
166.	RUU tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	PEMERINTAH	
167.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	PEMERINTAH	
168.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	PEMERINTAH	
169.	RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi	PEMERINTAH	

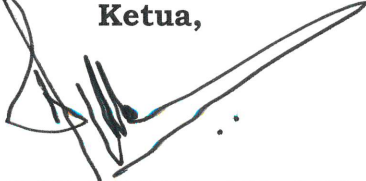
NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
170.	RUU tentang Perlelengan	PEMERINTAH	
171.	RUU tentang Penilai	PEMERINTAH	
172.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	PEMERINTAH	
173.	RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal	PEMERINTAH	
174.	RUU tentang Rahasia Negara	PEMERINTAH	
175.	RUU tentang Persandian	PEMERINTAH	
176.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	PEMERINTAH	
177.	RUU tentang Jaminan Benda Bergerak	PEMERINTAH	
178.	RUU tentang Perubahan Harga Rupiah	PEMERINTAH	
179.	RUU tentang Keamanan Laut	PEMERINTAH	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
180.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia	PEMERINTAH	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
181.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan	PEMERINTAH	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
182.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga	PEMERINTAH	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029

NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
183.	RUU tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman/RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman	PEMERINTAH	<i>Omnibus Law</i> Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
184.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	PEMERINTAH	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
185.	RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal	PEMERINTAH	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
186.	RUU tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia	DPD	
187.	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	DPD	
188.	RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah	DPR/ PEMERINTAH/ DPD	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
189.	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Daerah	DPD	
190.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh	PEMERINTAH	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
191.	RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	DPD	
192.	RUU tentang Ketransmigrasian	DPD	
193.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11	DPD	

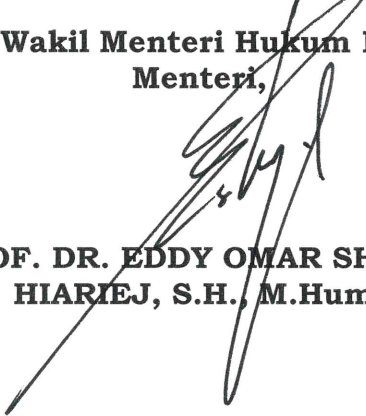
NO	JUDUL RANCANGAN UNDANG-UNDANG	NA DAN RUU DISIAPKAN OLEH	KETERANGAN/ USULAN RUU
	Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial		
194.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan	DPD	
195.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian	DPD	
196.	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro	DPD	
197.	RUU tentang Perkotaan	DPD	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029
198.	RUU tentang Material Maju	DPD	Prolegnas Perubahan Tahun 2025-2029

NO	DAFTAR RUU KUMULATIF TERBUKA
1.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pengesahan Perjanjian Internasional
2.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka akibat Putusan Mahkamah Konstitusi
3.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Pembentukan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
5.	Daftar Rancangan Undang-Undang Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang

Jakarta, 18 September 2025
Badan Legislasi DPR RI
Ketua,


DR. BOB HASAN, SH., MH.

Wakil Menteri Hukum RI
Menteri,


PROF. DR. EDDY OMAR SHARIF
HIARIEJ, S.H., M.Hum.

Panitia Perancang Undang-Undang DPD
RI
Wakil Ketua,


DR. RIEDNO GRAAL TALIAWO, S.SOS.,
M.SI.